



## **OLIGARKI DAN KEMUNDURAN DEMOKRASI DI INDONESIA: ANALISIS TINJAUAN LITERATUR**

### ***OLIGARCHY AND THE DECLINE OF DEMOCRACY IN INDONESIA: AN ANALYTICAL LITERATURE REVIEW***

**Yehezkiel D Ambarita<sup>\*</sup>, Keisyah Adelia Riadi<sup>2</sup>, Inayasha<sup>3</sup>, Dwi Octarianda Sari<sup>4</sup>, Salome  
Susihati Gulo<sup>5</sup>, Permata Dara Sari<sup>6</sup>, Ria Manurung<sup>7</sup>, Silvia Annisa<sup>8</sup>**

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara

Email: yehezkiel@students.usu.ac.id

---

#### Article Info

#### Article history :

Received : 25-09-2025

Revised : 26-09-2025

Accepted : 28-09-2025

Published : 30-09-2025

#### Abstract

*This article examines the challenges of Indonesia's democracy, focusing on two key issues, oligarchic dominance and the decline of democratic quality. Using a literature review method from both national and international sources, the findings reveal that oligarchs dominate electoral politics through financing, elite networks, and control over economic resources. These dynamics render procedural democracy vulnerable to elite capture. Moreover, institutional reports and academic studies indicate democratic backsliding, characterized by restrictions on civil liberties, weakened electoral integrity, and the consolidation of executive power. Employing the theoretical frameworks of Mosca, Habermas, and Marx, this article concludes that Indonesia's democracy remains substantively fragile. Key recommendations include legal reform, strengthened public participation, and rigorous monitoring of political financing as prerequisites for building a more inclusive and representative democracy.*

**Keywords:** *Indonesian democracy, oligarchic dominance, democratic quality*

---

#### Abstrak

Artikel ini menelaah tantangan demokrasi Indonesia dengan menekankan dua persoalan utama, yaitu dominasi oligarki dan kemunduran kualitas demokrasi. Dengan metode tinjauan literatur dari sumber nasional dan internasional, ditemukan bahwa oligarki memainkan peran dominan dalam politik elektoral melalui pendanaan, jaringan elit, dan kontrol atas sumber daya ekonomi. Kondisi ini menjadikan demokrasi prosedural rentan terhadap kooptasi elit minoritas. Selain itu, laporan institusional dan studi akademik mengindikasikan degradasi kualitas demokrasi, ditandai dengan pembatasan kebebasan sipil, melemahnya integritas pemilu, dan konsolidasi kekuasaan eksekutif. Dengan menggunakan kerangka teori Mosca, Habermas, dan Marx, artikel ini menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia bersifat rapuh secara substansial. Rekomendasi utama mencakup reformasi hukum, penguatan partisipasi publik, dan pengawasan ketat terhadap pendanaan politik sebagai prasyarat bagi demokrasi yang inklusif dan representatif.

**Kata Kunci:** **Demokrasi Indonesia, Dominasi Oligarki, Kualitas Demokrasi**

#### PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara di seluruh dunia mulai menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan utama mereka. Pada tahun 1949, Organisasi Pendidikan, Sains, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) menyatakan bahwa “mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi diklaim sebagai ideal yang tepat untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang dianjurkan oleh para tokoh berpengaruh”. Ini juga terjadi di



Indonesia, terutama setelah era reformasi, ketika perjuangan kolektif rakyat merebut kembali kedaulatan dan mengakhiri rezim otoriter Orde Baru.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Indonesia adalah Negara Hukum, di mana hukum dan konstitusi seharusnya menjadi pengendali utama kekuasaan. Undang-undang di Indonesia disusun dalam kerangka hierarki yang berpuncak pada konstitusi, yang idealnya memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah berada dalam batas hukum. Namun, kenyataannya, pengaruh oligarki menunjukkan bahwa struktur hukum saja belum cukup untuk menahan akumulasi kekuasaan dan pengaruh politik oleh segelintir elite (Ananta, 2017; Muhlis, 2021). Meskipun prosedur demokrasi berjalan, hierarki hukum sering kali tidak efektif dalam mencegah praktik politik yang menguntungkan kelompok tertentu, sehingga kualitas demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan serius (Pribadi & Ramadhan, 2023; Prasetyo, 2017). Setelah lebih dari dua dekade reformasi, demokrasi Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan utama, yaitu dominasi oligarki dalam sistem politik dan gejala kemunduran kualitas demokrasi.

Dominasi oligarki di Indonesia tampak ketika adanya intervensi oligarki dalam Pemilu yang dapat berupa apa saja. Melalui kekuasaan material yang dimilikinya, oligarki dapat mengintervensi melalui *money politics* dalam pemilu, penetapan calon, intervensi parpol peserta pemilu, dan berbagai intervensi lainnya. Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan tentang bagaimana praktik oligarki dijalankan. Salah satunya diungkapkan oleh Muhammad Maddimuri yang menyatakan bahwa kekuasaan oligarki pasca Orde Baru menyebabkan meluasnya praktik oligarki dalam proses politik di Indonesia (Maddimuri, 2022). Pada saat yang sama, demokrasi Indonesia juga menghadapi tantangan lain yang memundurkan kualitasnya yang tercermin dari berkurangnya kebebasan berpendapat, menurunnya standar pemilu, serta dominasi cabang eksekutif atas ruang publik. Freedom House (2023) menurunkan status Indonesia dari “bebas” menjadi “sebagian bebas”, sementara Jentera (2024), Ristawati (2017), dan Indriasari (2023) menunjukkan adanya pembatasan kebebasan sipil melalui instrumen hukum dan praktik politik yang membatasi kritik masyarakat. Temuan tersebut menegaskan bahwa penurunan kualitas demokrasi bukan sekadar wacana, melainkan realitas yang telah didokumentasikan secara akademik maupun institusional.

Secara historis, oligarki memang telah lama beroperasi melalui pola kekuasaan tiranik yang menekan masyarakat dan menuntut kepatuhan (Fachrudin, 2022). Dalam konteks demokrasi, oligarki sering kali menyusup ke dalam sistem pemerintahan dan hukum tanpa disadari, membentuk pola kekuasaan yang kompleks (Zahara et al., 2023). Meskipun prosedur demokrasi tetap berjalan, kepentingan penguasa tetap memengaruhi pengambilan keputusan, menciptakan lapisan dominasi elit yang sulit ditembus. Kondisi ini menegaskan bahwa sistem politik Indonesia masih dikuasai segelintir elit yang mampu mengendalikan massa dan sumber daya finansial untuk mempertahankan kekayaan dan status sosial-politiknya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, muncul beberapa pertanyaan penting, yaitu bagaimana oligarki dapat tetap memegang kendali politik dan ekonomi di Indonesia meskipun negara ini menganut sistem demokrasi?, serta sejauh mana dominasi oligarki membuat demokrasi kurang efektif dan gagal merepresentasikan kepentingan rakyat?.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, analisis ini diarahkan atau bertujuan untuk menelaah peran dominasi oligarki dalam demokrasi Indonesia, khususnya pada aspek prosedural, representasi



publik, dan partisipasi masyarakat. Melalui kajian ini, pembaca diharapkan dapat memahami mekanisme kekuasaan oligarki dan lebih kritis terhadap praktik-praktik yang mengancam demokrasi.

## **Kerangka Teori**

### **1. Teori Elite (Mosca)**

Teori elit Mosca (Bellamy, 2004) menyatakan bahwa kekuasaan politik tidak lagi ditentukan oleh kebajikan atau garis keturunan, tetapi melalui penguasaan “kekuatan sosial” yang memberikan keunggulan intelektual, ekonomi, dan prestise moral. Dalam konteks Indonesia, gagasan ini membantu memahami dominasi oligarki, di mana elit lama berusaha mempertahankan kekayaan dan posisi, sementara elit baru mencoba menggantikannya.

Selain itu, Mosca menekankan bahwa kualitas individu elit berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan nilai yang berlaku dalam masyarakat (Bellamy, 2004, p.26). Dalam demokrasi Indonesia, karakter dan strategi elit yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada publik menjadi salah satu faktor yang mengurangi kualitas demokrasi. Keunggulan minoritas elit, kemampuan bertindak cepat, menjaga kohesi, dan memanfaatkan sumber daya, membatasi partisipasi efektif mayoritas rakyat.

Dengan demikian, teori Mosca menyediakan kerangka analitis untuk menganalisis dominasi oligarki dan kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia, di mana meskipun prosedur formal demokrasi tetap berjalan, pengambilan keputusan strategis lebih banyak dikuasai oleh elit minoritas.

### **2. Teori Demokrasi Deliberatif (Habermas)**

Demokrasi deliberatif muncul sebagai kritik terhadap model demokrasi yang terlalu menekankan peran elit politik dalam pengambilan keputusan, sehingga mengabaikan partisipasi rakyat sebagai sumber legitimasi utama (Saward, 2003). Dalam kerangka ini, setiap warga negara dianggap setara secara politik, artinya semua individu memiliki kemampuan yang sama untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, asalkan mereka memiliki kesempatan memadai untuk memahami isu melalui proses deliberatif.

Habermas (1996) menekankan bahwa legitimasi keputusan politik bergantung pada kualitas deliberasi publik, yang meliputi tiga indikator utama: akses informasi, alasan publik, dan inklusivitas. Akses informasi menjamin bahwa warga memiliki pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi secara efektif; alasan publik menuntut agar keputusan dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara rasional, sementara inklusivitas menegaskan perlunya keterlibatan semua warga secara setara. Pandangan serupa dikemukakan oleh Rawls (1997), yang menegaskan bahwa keputusan politik yang sah harus lahir dari deliberasi rasional antara agen-agen yang bebas, setara, dan memiliki kepentingan terhadap tujuan bersama masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, demokrasi deliberatif relevan untuk menganalisis dua tantangan utama. Pertama, dominasi oligarki membatasi partisipasi rakyat secara setara, karena kekuasaan dan sumber daya politik terkonsentrasi pada minoritas elit. Akibatnya, proses deliberatif menjadi timpang, di mana suara mayoritas tidak selalu memengaruhi keputusan strategis (Ananta, 2017; Muhlis, 2021). Kedua, kemunduran kualitas demokrasi terlihat dari



terbatasnya kebebasan sipil, akses informasi yang tidak merata, dan ruang publik yang menyempit akibat tekanan politik atau kontrol media (Pribadi & Ramadhan, 2023; Aip Syarifudin, 2023). Dalam kondisi ini, indikator deliberasi *public*, akses informasi, alasan publik, dan inklusivitas, sering tidak terpenuhi, sehingga legitimasi keputusan politik menjadi lemah.

Dengan demikian, demokrasi deliberatif menyediakan kerangka analitis untuk menilai kualitas demokrasi Indonesia. Melalui lensa ini, dominasi oligarki dapat dipahami sebagai hambatan struktural bagi partisipasi setara warga, sementara kemunduran kualitas demokrasi terkait dengan gagalnya pemenuhan indikator deliberasi publik. Penerapan prinsip deliberatif juga menekankan peran media dan kebebasan sipil sebagai sarana agar rakyat dapat mengakses informasi, berdiskusi secara rasional, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan politik secara setara.

### 3. Teori Konflik (Karl Marx)

Menurut teori konflik, masyarakat adalah tempat di mana kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik menguasai kebijakan publik dan hukum. Hukum sering ditangkap dan digunakan untuk melindungi kepentingan individu tertentu daripada kepentingan umum. Konsep ini sangat penting untuk memahami bagaimana demokrasi Indonesia berkembang selama sepuluh tahun terakhir.

Studi Tambunan (2023) menunjukkan bahwa oligarki memainkan peran penting dalam proses legislatif. Misalnya, mereka menetapkan ambang batas untuk pencalonan presiden untuk mengurangi persaingan politik. Asrinaldi, Yusoff, dan Karim (2022) menyatakan hal yang sama: DPR seringkali menjadi alat politik oligarki, dengan koalisi partai menjaga kepentingan elit daripada meningkatkan akuntabilitas publik. Kebijakan strategis seperti Omnibus Law, UU KPK, dan UU Minerba menunjukkan dominasi ini, yang meningkatkan keuntungan pemilik modal dan jaringan elite politik sambil mengurangi partisipasi dan pengawasan publik (Layyina et al., 2024).

Selain itu, Wiratraman & Prakasa (2024) menunjukkan bahwa dengan mengurangi kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan akademik, kontrol oligarki semakin kuat. Ini terjadi karena kritik terhadap kekuasaan dibatasi. Oleh karena itu, meskipun demokrasi Indonesia masih ada secara prosedural, kerangka teori konflik membantu menjelaskan bahwa demokrasi secara substansial mengalami kemunduran karena oligarki mengontrolnya dengan memanfaatkan hukum, peraturan, dan struktur politik untuk mempertahankan dominasinya.

### METODE PENELITIAN

Untuk penelitian ini, artikel ilmiah yang relevan dipilih melalui tinjauan literatur. Koleksi perpustakaan perguruan tinggi dan basis data akademik seperti Google Scholar dan Scopus digunakan untuk melakukan penelusuran. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa beberapa artikel akan berbicara tentang pengaruh atau dominasi oligarki dalam demokrasi, dengan penekanan khusus pada kasus Indonesia. Agar cakupan analisis tetap luas, artikel yang dimasukkan mencakup publikasi berbahasa Inggris dan Indonesia. Selama proses penilaian, artikel yang berbicara tentang peran oligarki ekonomi dan politik dalam sistem demokrasi dan yang mampu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan demokrasi Indonesia menjadi kurang efektif dipilih. Namun, artikel yang tidak



tersedia dalam bahasa Indonesia atau Inggris ditolak karena keterbatasan akses bahasa. Publikasi yang sudah berusia lebih dari sepuluh tahun juga ditolak karena dianggap tidak mencerminkan dinamika modern. Untuk memenuhi kriteria tersebut, penelitian ini menggunakan setidaknya tujuh hingga sepuluh artikel yang layak untuk dievaluasi lebih lanjut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dominasi Oligarki Dalam Sistem Politik Indonesia

Fakta oligarki Indonesia menunjukkan paradoks demokrasi setelah Reformasi. Proses demokratis seperti kebebasan sipil, multipartai, dan pemilu langsung telah diadopsi secara formal oleh sistem politik Indonesia. Namun, oligarki justru menemukan cara untuk menyesuaikan diri dan memperluas kekuasaan mereka melalui proses ini. Winters (2011) menyebut situasi ini sebagai adaptasi oligarki, di mana oligark tidak lagi bekerja melawan demokrasi, tetapi menggunakan demokrasi sebagai alat untuk mempertahankan kekayaan dan kekuasaan mereka. Dengan kata lain, oligarki tidak dihilangkan oleh demokrasi; sebaliknya, demokrasi memberi mereka cara baru untuk memperluas pengaruhnya. iklus pengambilan pemerintah terdiri dari hubungan simbiotik antara oligarki dan para politisi (Robison & Hadiz, 2004). Dukungan keuangan terhadap partai politik dan kandidat bukanlah hanya taktik pemilihan; itu adalah investasi yang akan mempertahankan kendali oligarki atas kebijakan negara untuk waktu yang lama. Mietzner (2013) menekankan bahwa, karena biaya politik yang tinggi di Indonesia, partai hampir tidak dapat bertahan tanpa dukungan keuangan. Akibatnya, politik menjadi "pasar terbuka" bagi oligarki. Akibatnya, institusi demokrasi yang seharusnya mewakili rakyat telah berubah menjadi alat untuk kepentingan ekonomi kelompok tertentu.

Paradoks semakin terlihat saat partisipasi rakyat digunakan sebagai legitimasi prosedural bagi oligarki. Data yang dikumpulkan oleh CSIS pada tahun 2019 menunjukkan bahwa antusiasme pemilih yang tinggi selama Pemilu 2019 menunjukkan kepercayaan masyarakat pada demokrasi. Suara rakyat, bagaimanapun, hanya berhenti pada proses elektoral. Setelah pemilu usai, segelintir orang kaya yang memiliki uang tetap memegang kendali atas keputusan. Dengan demikian, demokrasi Indonesia memiliki "dua wajah": strukturnya kuat, tetapi substansinya rapuh karena terjebak dalam dominasi oligarkis.

Selain itu, situasi ini menunjukkan reproduksi anomali struktural. Karena Marx melihat negara sebagai "komite yang mengurus kepentingan kelas berkuasa", situasi di Indonesia setelah Reformasi menunjukkan bahwa oligarki, sebagai kelas dominan, menggunakan negara sebagai instrumen untuk mengumpulkan kekayaan mereka.



Gambar 1. Proses pemungutan suara pada Pemilihan Presiden Indonesia, Rabu, 17 April 2019.  
(Sumber: CSIS, 2019)



Sebagai ilustrasi, dalam pemilihan umum di Indonesia, besaran dana kampanye terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil kontestasi politik, terutama dalam iklim demokrasi yang semakin kompetitif. Kandidat dengan sumber daya finansial lebih besar umumnya mampu mengoptimalkan strategi kampanye, mulai dari iklan politik, mobilisasi pemilih, hingga pembentukan opini public, yang sulit disaingi oleh kandidat dengan anggaran terbatas. Dalam kondisi demikian, koneksi dengan kelompok pengusaha besar menjadi faktor yang memperkuat posisi politik tertentu.

Fenomena tersebut terlihat pada Pemilihan Presiden 2024. Pengusaha besar mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024, menunjukkan dominasi kapital semakin menguasai demokrasi elektoral Indonesia. Fakta bahwa setidaknya dua puluh lima pelaku usaha dalam industri ekstraktif disebut sebagai penyokong utama adalah bukti konsolidasi oligarki yang mengaburkan perbedaan antara ekonomi dan politik (JATAM & ICW, 2024). Secara terbuka, Boy Thohir menyatakan bahwa sepertiga ekonomi nasional dimiliki oleh kelompok bisnis pendukung. Pernyataan ini menunjukkan bahwa hasil pemilu tidak lagi hanya produk suara rakyat tetapi juga representasi kepentingan kelas ekonomi yang dominan. Di tempat ini, demokrasi telah berubah menjadi alat legitimasi bagi kekuatan kapital, alih-alih menjadi tempat perwakilan rakyat.

Keterlibatan langsung para taipan dalam agenda diplomatik pasca-pemilu, seperti kunjungan Presiden Prabowo ke Tiongkok bersama pengusaha besar (Kompas, 2024; Tempo, 2024), menunjukkan bahwa dukungan elektoral telah berubah menjadi akses eksklusif ke kebijakan luar negeri dan ekonomi strategis. Situasi ini menunjukkan logika pengambilan negara (Robison & Hadiz, 2004), di mana negara tidak runtuh secara resmi, tetapi kepentingan kelompok ekonomi tertentu mengubah kebijakan publik. Menurut Winters (2011), setelah 2024, aliansi modal-politik akan mencakup perlindungan kekayaan dan pengembangan kapital yang terintegrasi dalam kebijakan negara. Oleh karena itu, Pemilu 2024 akan menandai fase baru oligarkisasi demokrasi Indonesia, dengan dominasi langsung atas sistem institusional negara bukan lagi sekadar partisipasi keuangan dalam politik.



Gambar 2. Ilustrasi jaringan hubungan antara calon kandidat dan konglomerat di Indonesia.

(Sumber: JATAM & ICW (2024), *Politik Elektoral sebagai Pesta Oligarki Ekstraktif. Kertas Posisi Bersama*. <https://antikorupsi.org/id/politik-elektoral-sebagai-pesta-oligarki-ekstraktif>)

Seperti telah disebutkan sebelumnya, Aburizal Bakrie (sering dipanggil Ical), ayah dari Anindya Bakrie, mendukung pasangan Prabowo–Gibran melalui Partai Golkar, di mana ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina. Dalam laporan JATAM dan ICW (2024, hlm. 4), disebutkan bahwa



Partai Golkar memperoleh posisi signifikan dalam susunan kabinet Prabowo, dengan menempatkan sedikitnya 12 kader dalam struktur pemerintahan, terdiri dari delapan menteri, tiga wakil menteri, serta satu penasihat khusus presiden yang juga menjabat sebagai Kepala Dewan Ekonomi Nasional.

Selain itu, laporan yang sama mencatat bahwa sejumlah pelaku usaha dari sektor ekstraktif maupun perkebunan yang sebelumnya memberikan dukungan politik turut memperoleh posisi strategis di pemerintahan, baik sebagai menteri, wakil menteri, maupun pejabat setingkat lembaga negara. Praktik pengisian jabatan ini dipandang oleh banyak pengamat sebagai bagian dari kompromi politik yang berkaitan dengan biaya elektoral yang tinggi dalam kontestasi di Indonesia.

Biaya kampanye sebesar Rp50 miliar hingga Rp157 miliar (KPU, 2024) menunjukkan bahwa persaingan politik di Indonesia sangat mahal. Karena kandidat bergantung pada sumbangan pihak ketiga, baik individu maupun korporasi, pendanaan politik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keuntungan ekonomi penyumbang. Jika tidak ada transparansi yang cukup tentang identitas donor, ada kemungkinan bahwa kebijakan publik akan diambil alih oleh penyandang dana daripada masyarakat luas (Winters, 2011). Oleh karena itu, pemilu justru menjadi cara untuk memperluas oligarki, di mana kekayaan moneter menentukan siapa yang dapat bersaing.

Transparansi dana kampanye adalah bagian dari strategi politik selain masalah teknis. Untuk menyamakan aktivitas mereka, oligarki ekonomi biasanya memanfaatkan celah dalam regulasi melalui jaringan perusahaan cangkang dan perantara individu. Ini menunjukkan bahwa peraturan saat ini lebih bersifat kosmetik daripada substansial. Menurut Robison dan Hadiz (2004), dominasi oligarki dalam struktur politik Indonesia pasca-reformasi ditandai oleh kombinasi antara praktik patronase informal dan demokrasi formal. Akibatnya, diskusi tentang pengawasan publik harus dipertimbangkan secara cermat karena pengawasan masyarakat hanya akan menjadi bentuk partisipasi yang tidak memiliki kekuatan nyata jika sistem pembiayaan politik tidak diubah secara menyeluruh.

### **Kemunduran Kualitas Demokrasi di Indonesia**

Kemerosotan demokrasi di Indonesia tidak hanya dapat diukur melalui proses seperti pemilu, tetapi juga melalui kebebasan sipil, terutama kebebasan berbicara. Freedom of speech dan kebebasan media telah menurun, menurut data dari V-Dem Institute's 2024 Democracy Report. Fakta ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia sedang mengalami backsliding demokrasi, yang berarti pelemahan bertahap dari nilai dasar demokrasi melalui instrumen hukum dan praktik politik (Bermeo, 2016). Salah satu mekanisme utama adalah penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal-pasal halus dalam UU ini digunakan untuk menghalangi kritik terhadap pemerintah daripada melindungi masyarakat dari kejahatan siber. Oleh karena itu, tempat publik yang seharusnya digunakan untuk melakukan diskusi politik justru berubah menjadi tempat untuk mengontrol. Ketika aktivis, jurnalis, dan warga biasa yang menyuarakan kritik dikriminalisasi, ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi semakin dibatasi.

Laporan Human Rights Watch (2023) menambahkan elemen penting lainnya: tekanan terhadap jurnalis independen dan media. Intimidasi dan sensor tidak hanya mengurangi kualitas pemberitaan, tetapi juga menyebabkan efek "chilling effect", di mana masyarakat dan media memilih untuk diam karena takut akan akibat politik dan hukum. Hal ini mengancam demokrasi modern karena masyarakat memiliki akses ke informasi yang bebas, beragam, dan dapat diandalkan



(Dahl, 1989).

Selain itu, ada banyak konsekuensi dari membatasi kebebasan berekspresi. Pertama, publik kehilangan kemampuan untuk mengawasi pemerintah, yang meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, karena pemilih tidak memiliki akses ke informasi yang memadai untuk membuat keputusan rasional, kualitas pemilu menurun. Terakhir, perangkat hukum dan politik menekan kritik yang seharusnya mengimbangi kekuasaan.

Oleh karena itu, pengurangan kebebasan berekspresi merupakan bagian yang lebih mendasar dari kehancuran demokrasi daripada hanya masalah kebebasan sipil. Mengubah demokrasi dari "pemerintahan oleh rakyat" menjadi sekadar proses pemilihan dengan partisipasi minimal, pemungutan suara kritis pada akhirnya menghancurkan dasar demokrasi deliberatif.

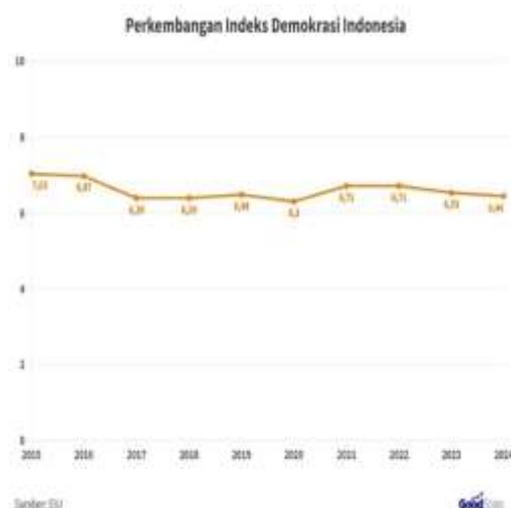


Gambar 3. Indeks Kebebasan Sipil di Indonesia (2016-2025)

(Sumber: <https://data.goodstats.id/statistic>)

Selain kebebasan berekspresi, kualitas pemilu merupakan ukuran penting untuk mengetahui seberapa solid demokrasi. Data dari GoodStats (2015–2025) menunjukkan tren penurunan dalam indeks demokrasi Indonesia, terutama dalam hal keadilan dan transparansi pemilu. Meningkatnya laporan tentang ketidaksesuaian daftar pemilih tetap (DPT), distribusi logistik yang tidak merata, dan proses penghitungan suara yang menimbulkan keraguan merupakan bukti dari tren ini.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia semakin jauh dari gagasan "pemilu yang bebas dan adil" dan semakin menuju praktik elektoral yang tidak teratur. Seperti yang ditunjukkan oleh studi Angiolillo et al. (2024) dan Power (2020), manipulasi suara dan politik uang masih menjadi praktik umum dalam kompetisi elektoral di Indonesia. Jual beli suara lebih umum terjadi di daerah di mana media dan lembaga independen tidak mengawasinya. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pemilu, yaitu proses di mana pemimpin harus bertanggung jawab kepada rakyat melalui pemilu, kurang. Dibandingkan dengan meningkatkan legitimasi demokrasi, pemilu menjadi tempat transaksional yang menghidupkan oligarki politik.



Gambar 4. Indeks Demokrasi di Indonesia (2015-2025)

(Sumber: <https://data.goodstats.id/statistic>)

Selain itu, kekerasan terhadap pemilih, terutama di wilayah yang memiliki sejarah konflik politik, meningkatkan tingkat represi dalam proses elektoral. Norris (2015) menekankan bahwa intimidasi seperti ini memengaruhi hasil suara dan merusak keyakinan masyarakat terhadap keabsahan pemilu. Siklus apatisme politik terjadi ketika kepercayaan publik rusak, yang mengakibatkan penurunan partisipasi masyarakat karena mereka merasa suara mereka tidak berarti. Ketika legitimasi demokrasi berkurang, terjadi peningkatan kemungkinan instabilitas sosial, karena masyarakat lebih cenderung menyalurkan ketidakpuasan mereka melalui protes jalanan atau bahkan tindakan radikal. Stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia sangat terganggu oleh kemunduran demokrasi. Kemungkinan konflik sosial di masyarakat meningkat karena kebebasan berekspresi dan politik yang terus dibatasi. Salah satu cara untuk mengekspresikan penolakan mereka adalah dengan turun ke jalan.

Kemunduran demokrasi Indonesia menurunkan kualitas politik dan ekonomi. Menurut penelitian, kepastian hukum dan stabilitas politik adalah faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor asing saat memilih lokasi investasi (Acemoglu & Robinson, 2019). Ketidakpastian pasar muncul ketika demokrasi melemah, karena regulasi sering berubah sesuai dengan kepentingan kelompok yang berkuasa. Ini mengakibatkan penurunan lapangan kerja, penurunan pertumbuhan ekonomi, dan penurunan arus modal asing. Karena pemilu yang kompetitif dan transparan mendorong pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan rakyat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan kelompok elit, Fukuyama (2014) menekankan bahwa demokrasi yang sehat berfungsi sebagai mekanisme distribusi sumber daya yang lebih adil karena kebijakan ekonomi cenderung bias terhadap oligarki, meningkatkan kesenjangan sosial, dan mengurangi mobilitas ekonomi.

Dalam hal Indonesia, iklim investasi dipengaruhi secara langsung oleh penurunan indeks demokrasi dan gejala penguasaan negara oleh elit politik dan bisnis. Investor internasional menghindari situasi di mana aparat hukum tidak independen atau kontrak bisnis dapat dengan mudah dianulir. Efeknya berlapis-lapis, termasuk penurunan kepercayaan terhadap negara dan penurunan kapasitas fiskal akibat pengurangan investasi asing. Pada akhirnya, masyarakat luas yang menanggung konsekuensi dalam bentuk ketidakstabilan ekonomi dan kurangnya kesempatan kerja.



Untuk mengatasi kemunduran demokrasi, strategi yang kompleks diperlukan. Strategi ini tidak hanya harus berkonsentrasi pada reformasi kelembagaan dan hukum, tetapi juga pada penguatan standar demokratis dalam kehidupan politik sehari-hari. Toleransi, sikap saling menghormati antarpartai, dan independensi media adalah dasar demokrasi yang baik, menurut Levitsky dan Ziblatt (2018). Untuk Indonesia, reformasi yang mendesak harus mencakup revisi Undang-Undang Pemilu dan berbagai undang-undang yang membatasi kebebasan sipil, penguatan sistem pemantauan pemilu independen, dan perlindungan nyata terhadap jurnalisme investigatif dan media. Di sisi lain, masyarakat sipil harus diperkuat untuk melakukan kontrol sosial dengan lebih baik. Langkah-langkah ini penting untuk menjamin bahwa demokrasi tidak terjebak dalam bentuk demokrasi illiberal yang hanya berfokus pada proses elektoral yang tidak memiliki arti. Pada akhirnya, demokrasi yang inklusif dan partisipatif bukan hanya kebutuhan politik tetapi juga prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, iklim investasi yang stabil, dan masyarakat yang adil dan setara di tengah tantangan dunia saat ini.

## **KESIMPULAN**

Kajian ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia pasca-reformasi masih berada dalam kondisi paradoks: di satu sisi, prosedur demokrasi berjalan, tetapi di sisi lain substansinya rapuh akibat penetrasi oligarki. Oligarki terbukti menguasai arena politik melalui pendanaan kampanye, jaringan kekuasaan, dan kontrol ekonomi, yang menyebabkan politik elektoral rentan menjadi “pesta oligarki”. Di saat bersamaan, kualitas demokrasi juga terdegradasi melalui pembatasan kebebasan sipil, lemahnya integritas pemilu, dan dominasi cabang eksekutif. Dengan memanfaatkan teori elite Mosca, demokrasi deliberatif Habermas, serta teori konflik Marx, dapat disimpulkan bahwa demokrasi Indonesia beroperasi dalam ruang yang dikuasai elit minoritas, sehingga gagal sepenuhnya mewujudkan prinsip representasi rakyat dan deliberasi publik.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil kajian, beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat demokrasi Indonesia adalah sebagai berikut:

### **1. Reformasi Hukum dan Regulasi Politik**

Pemerintah perlu melakukan reformasi hukum yang konsisten, khususnya terkait regulasi pendanaan politik dan transparansi pemilu. Langkah ini penting untuk mempersempit ruang penetrasi oligarki dan memastikan kontestasi politik berjalan lebih adil.

### **2. Penguatan Peran Masyarakat Sipil dan Media Independen.**

Masyarakat sipil dan media yang bebas harus diperkuat agar mampu berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan elit politik. Keberadaan mereka menjadi kunci dalam menjaga ruang publik yang terbuka, deliberatif, dan bebas dari dominasi oligarki.

### **3. Pengembangan Pendidikan Politik Berbasis Kesadaran Kritis.**

Pendidikan politik yang menekankan kesadaran kritis warga perlu digalakkan secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar partisipasi politik masyarakat tidak bersifat pragmatis atau transaksional, tetapi substantif dan mampu mendorong terciptanya demokrasi deliberatif.



#### 4. Penguatan Lembaga Pengawas Pemilu.

Lembaga pengawas pemilu harus diperkuat secara kelembagaan dengan jaminan independensi yang jelas. Independensi ini penting untuk memastikan integritas elektoral serta mencegah intervensi politik praktis dalam proses demokrasi.

#### REFERENSI

- Aspinall, E. (2015). Oligarchic democracy in Indonesia. *Pacific Affairs*, 88(1), 57–75. <https://doi.org/10.5509/201588157>
- Bünthe, M. (2020). Challenges to democratization in Southeast Asia: Resilience and regression. *Contemporary Southeast Asia*, 42(1), 1–29. <https://doi.org/10.1355/cs42-1a>
- Ford, M., & Pepinsky, T. B. (Eds.). (2014). *Beyond Oligarchy: Wealth, power, and contemporary Indonesian politics*. Cornell University Press.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2017). Competing populisms in post-authoritarian Indonesia. *International Political Science Review*, 38(4), 488–502. <https://doi.org/10.1177/0192512117697475>
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2024). *Laporan investigasi pendanaan politik dan oligarki dalam Pemilu 2024*. ICW. <https://antikorupsi.org>
- Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). (2024). *Oligarki ekstraktif dan Pemilu 2024*. JATAM. <https://jatam.org>
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2024). *Laporan dana kampanye peserta Pilpres 2024*. KPU. <https://kpu.go.id>
- Mietzner, M. (2015). Reinventing Asian populism: Jokowi's rise, democracy, and political contestation in Indonesia. *Policy Studies*, 72, 1–28. <https://doi.org/10.1355/9789814695595-007>
- Warburton, E. (2018). Deepening reform or consolidating power? Decentralization and oligarchy in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 48(1), 1–27. <https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1334220>
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.